

PERSOALAN TATA KELOLA DAN POLA KORUPSI SDA DI KALIMANTAN TIMUR

Haris Retno Susmiyati

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur

harisretno@fh.unmul.ac.id



⇒ Gubernur Suwarna ---Perkebunan

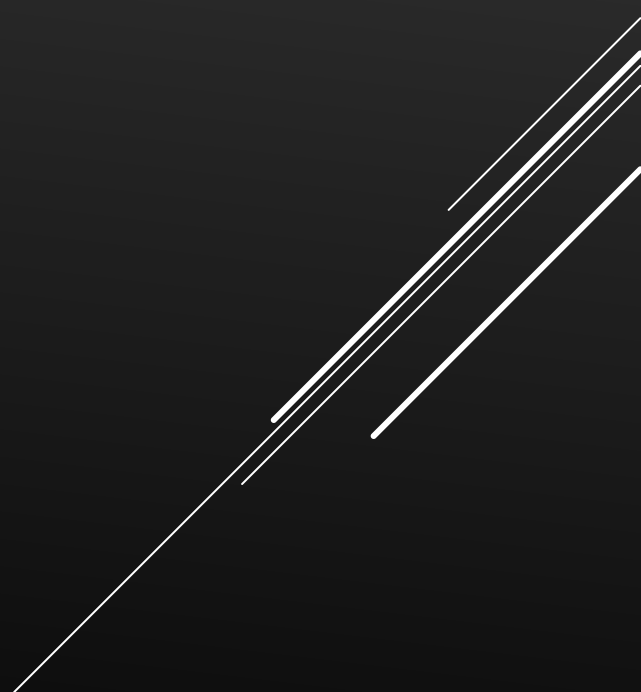
⇒ Rita Bupati Kutai Kartanegara ---Perkebunan

⇒ Bupati Syaukani---Dana Bagi Hasil Migas dan Lahan Bandara

⇒ Bupati Andi Harahap --- Izin Tambang Batubara

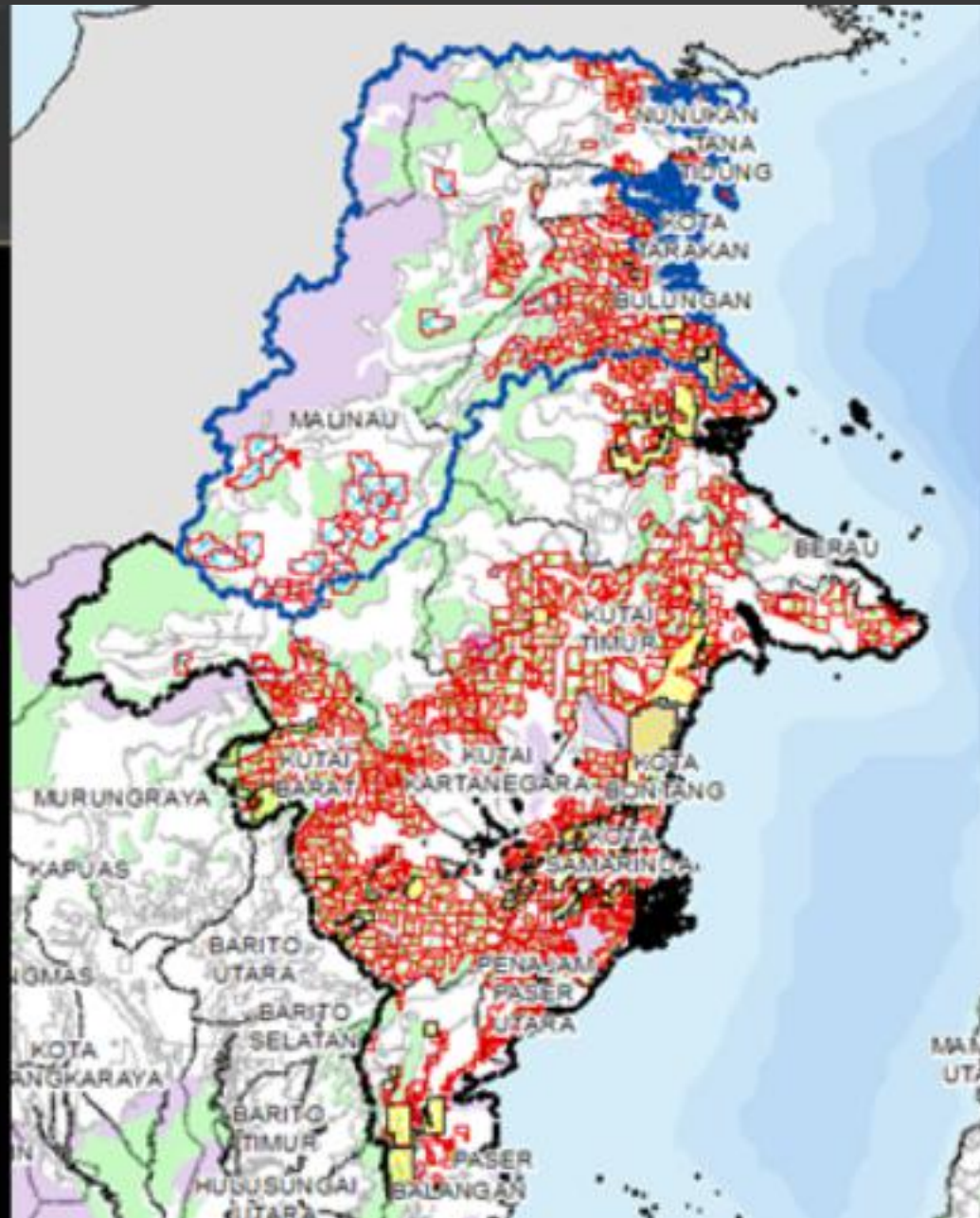
⇒ Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur

PERKARA KORUPSI KALTIM DARI GUBERNUR SUWARNA HINGGA BUPATI KUTAI TIMUR

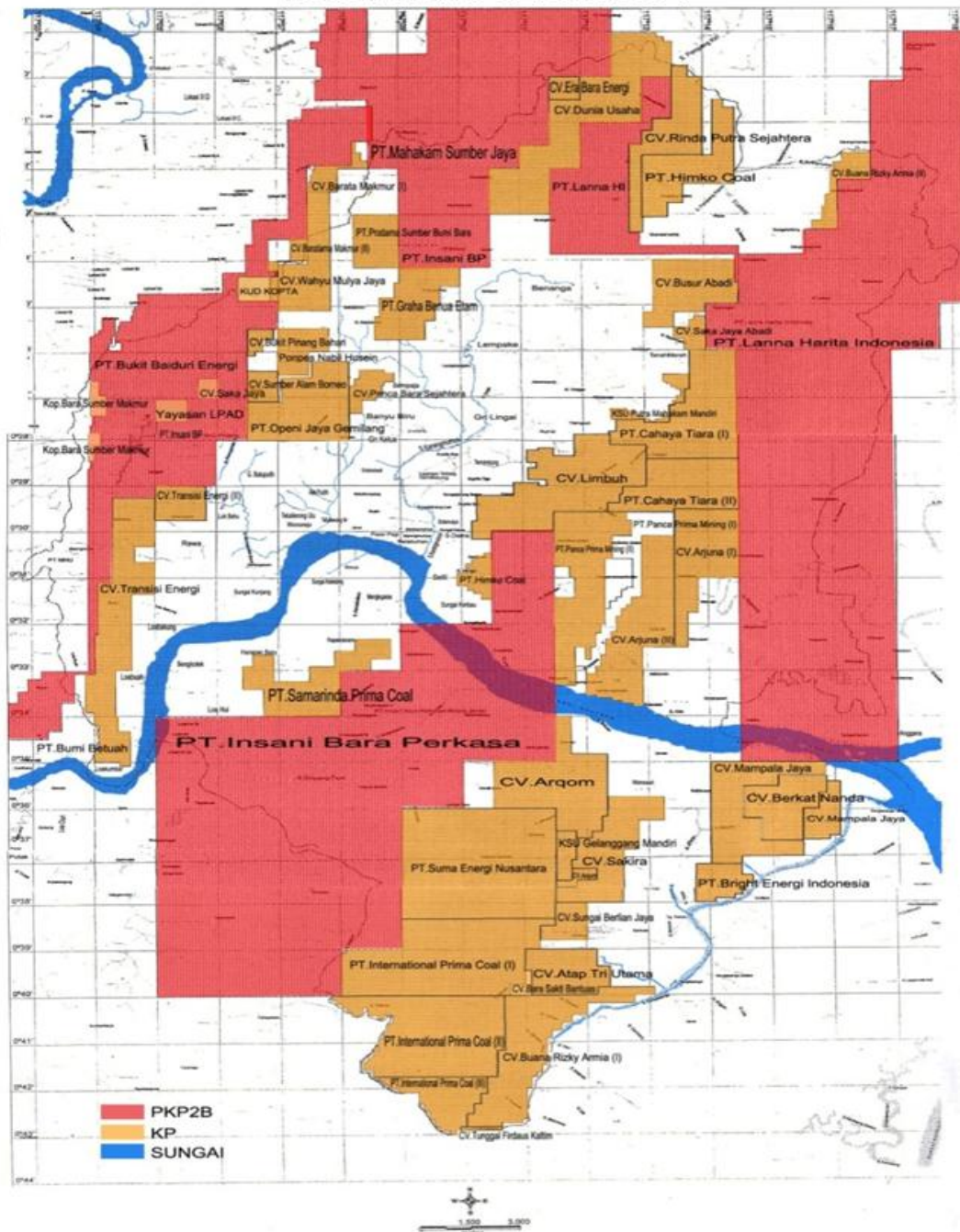


1.448
IJIN TAMBANG
KALTIM DAN
KALTARA
LUAS 7,2 JUTA
HEKTAR

KALTIM 1.404 IUP
LUAS 5,2 JUTA
HEKTAR



PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA KOTA SAMARINDA



**TAMBANG DI
KAWASAN PADAT
HUNI MELANGGAR
RTRW**

**71% KAWASAN
SAMARINDA
DIPERUNTUKKAN
PERTAMBANGAN**

Regulasi dan Perizinan
penetapan Jaminan

Pengawasan

Penegakan Hukum

Pra Eksploitasi

Tahap Operasi

Paska Operasi

TITIK KRUSIAL DALAM PENGELOLAAN SDA

REGULASI

- SUBSTANSI REGULASI EKSPLOTATIF DAN PRO MODAL/KORPORASI
- JAMINAN HAK DAN KESELAMATAN RAKYAT DIABAIKAN
- KEUNTUNGAN TERBESAR ADA PADA PENGUSAHA, dan PENGUASA

PERIZINAN

- AMDAL/IZIN LINGKUNGAN
- IZIN USAHA/KONTRAK KARYA
- TIDAK TRANSPARAN
- TIDAK SESUAI TATA RUANG

PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

- DITETAPKAN SEPIHAK, TIDAK TRANSPARAN
- PENETAPAN DANA JAMINAN REKLAMASI SANGAT KECIL

PRA EKSPLOITASI

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TDK BERIMBANG DAN KETAATAN RENDAH

Kewajiban keuangan IUP

Iuran Tetap Eksplorasi
US\$2/ha
pertahun

Iuran Tetap Operasi
Produksi
US\$2/ha pertahun

ROYALTI 3-7% Per
ton, berdasarkan
Harga Jual

Kewajiban keuangan PKP2B

Iuran Tetap Eksplorasi
US\$2/ha pertahun

Iuran Tetap
Operasi Produksi
US\$2/ha pertahun

ROYALTI 13,5% perton
berdasarkan harga jual.
3,5% dari 13,5%
diserahkan ke daerah

UU 3 Tahun 2020

Iuran Tetap eksplorasi
US\$ 2 ha/pertahun

Iuran Tetap Operasi Produksi
US\$ 2/ha pertahun

Royalti 4% perton berdasarkan harga
jual 6% diserahkan ke daerah

Dana Ketahanan Cadangan
(DKC) Minerba (Pasal 112A
Ayat 1). Untuk dana tambang



- ⇒ Dampak lingkungan yang besar tanpa ada proses hukum
- ⇒ Banjir lumpur yang merugikan ekonomi masyarakat
- ⇒ Penurunan kualitas air mengancam kesehatan warga
- ⇒ Pencemaran sungai menurunkan hasil tangkapan ikan

TAHAP OPERASI



KORUPSI DI PELABUHAN
SAMARINDA
PUNGLI DILAKUKAN
UNTUK BONGKAR MUAT
BATUBARA



LUBANG TAMBANG

Tanpa
reklamasi, hanya
memasang tanda
peringatan

<https://jaring.id/report/yang-hilang-setelah-tanah-berlubang/>

⇒ Pertambangan ilegal semakin marak,
semakin mendekati Kawasan
pemukiman dan menambang di
Kawasan hutan konservasi

⇒ Jalan umum rusak



<http://kaltim.tribunnews.com/2018/02/22/oknum-poli-yang-diduga-kelola-tambang-ilegal-sudah-diperiksa>

ILLEGAL MINING MELENGGANG BEBAS

- ⇒ Pelapor : JONO, Mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertambangan Penajam Paser Utara
- ⇒ Kasus tahun 2014, PT Pasir Prima Coal Indonesia yang mengklaim lahan PT Mandiri Sejahtera
- ⇒ Izin pasir prima dicabut pemda PPU krn tidak menaati kewajiban keuangan,
- ⇒ PT Pasir Prima Coal telah kalah di PTUN
- ⇒ Pasir Prima mendapat angin ketika masa yusran Aspar tahun 2013 melalui surat bupati, pasir prima dipersilahkan menambang
- ⇒ Jono dihukum penjara 7 bulan, dengan tuduhan membuat keterangan palsu dalam penerbitan izin tambang mandiri sejahtera.
- ⇒ Kalah di PTUN, PT Pasir Prima menggugat izin ke peradilan perdata. JONO menjadi turut tergugat dan dihukum denda 80 milliar
- ⇒ Berkaitan kasus Pasir Prima Coal berbuntut pelaporan
- ⇒ Bupati PPU diduga menerbitkan dokumen palsu IUP
- ⇒ sehingga terjadi tumpang tindih antar izin PT PPCI dan PT SPR

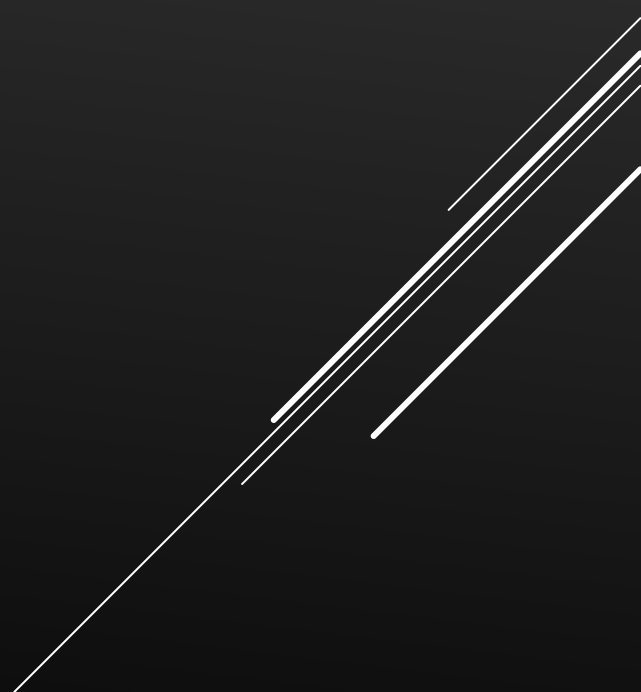
TAMBANG ILEGAL DI PENAJAM PASER UTARA

- ⇒ Klaim Wilayah Hutan negara—domein verklaring di jaman kolonial
- ⇒ Status Kawasan hutan untuk memudahkan investasi merusak kawasan hutan
- ⇒ Klaim kawasan hutan merampas wilayah hidup masyarakat adat

HUTAN

- ⇒ UU KEHUTANAN dibuat untuk memfasilitasi pertambangan dan justru memfasilitasi hilangnya kawasan hutan
- ⇒ Konstruksi hukum yang sesat
- ⇒ Tanggung jawab reklamasi yang tertutup
- ⇒ Ketaatan pembayaran kewajiban keuangan yang rendah
- ⇒ Kewajiban pembayaran penggunaan kawasan hutan tidak ditegakkan

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN



IPPKH

LEGALISASI PENGHANCURAN HUTAN

| Kabupaten | Jumlah IPPKH | Jumlah Perusahaan | Luas IPPKH Pertambahan (Ha) |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Kutai Kartanegara | 37 | 33 | 31.267,08 |
| Kutai Timur | 11 | 11 | 35.549,09 |
| Kutai Barat dan Mahulu | 18 | 18 | 21.983,81 |
| Paser | 5 | 4 | 1.884,35 |
| Penajam Paser Utara | 3 | 3 | 235,66 |
| Berau | 10 | 9 | 8.572,63 |
| Jumlah | 84 | 78 | 99.492,62 |

- ⇒ Izin tambang yang sudah keluar di Tahura tidak dicabut, namun dibiarkan sampai masa berlaku habis.
- ⇒ Bupati Kukar mengakui menerbitkan izin bukan di kawasan tahura, namun jika di koordinat masuk kawasan tahura
- ⇒ Terdapat 11 Izin Hauling di dalam Tambang Batubara di Tahura
- ⇒ Maraknya tambang ilegal

PENEGAKAN HUKUM TAMBANG DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI

- ⇒ Tumpang tindih perizinan
- ⇒ Konflik klaim wilayah adat
- ⇒ Alih Fungsi Kawasan Hutan
- ⇒ Pencemaran Lingkungan

PERKEBUNAN



- ⇒ Pelarangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara dan sawit dilarang berdasarkan perda nomor 10 tahun 2012,
- ⇒ Namun dalam pergub 43 tahun 2013, terdapat ketentuan dalam pasal 11 tentang pemberian izin persilangan membuka peluang adanya izin penggunaan jalan dengan dalih persilangan.
- ⇒ Kriteria persialangan tidak diatur secara jelas

PENGGUNAAN JALAN UMUM UTK SAWIT DAN TAMBANG



- ⇒ Hukum menjadi pelindung eksploitasi alam dan menghindar dari sanksi hukum korupsi
- ⇒ Pengambil kebijakan dan penegak hukum berada dalam lingkaran eksploitasi SDA pertambangan, perkebunan, kehutanan
- ⇒ Hukum justru menjadi pelindung bagi perilaku yang korup

POLA KORUPSI SDA